

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005)
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007)
- Ahmad Redi & Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law*, Diskursus Penerapannya dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional, Cet 1. (Depok, Rajawali Pers, 2020)
- Marzuki, P. M., *Pengantar ilmu hukum*. (Jakarta: Kencana 2013)
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, CET.Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014)
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta: Grasindo, 1999)
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996)
- Clinard, Marshall B., dan Peter C. Yeage, *Corporate Crime* (New York, The Free Press, 1983)

Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Prenada Media, Jakarta, 2008)

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng, Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan Kedelapan, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989)

D. Schaffmeister, *Perlindungan Hukum Pidana atas Obyek-obyek Lingkungan Hidup* dalam D. Schaffmeister dkk, *Kekhawatiran Masa Kini Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori & Prakti*, Diterjemahkan Oleh Tristan P. Moeliono, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994)

Eddy O.S, Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016)

Fernando M Manullang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007)

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Gramedia, Jakarta, 2003)

Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, (UNS Press, Surakarta, 2008)

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet Pertama, 2012)

Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Erlangga, Jakarta, 2004)

- H.R.Otje Salman,S., *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah,*
(Bandung, Rafika Aditama, 2010)
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Hukum Perdata
dan Hukum Pidana (The Theory of Legislation),* diterjemahkan oleh
Nurhadi, MA, (Bandung: Nusamedia, 2010)
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi,* (Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta,
2006)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang,* (Konstitusi Press, Jakarta, 2006)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif,* (Malang:
Bayumedia Publishing, 2005)
- Kusnu Goesniadhie. *Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan, (lex
Spesialis Suatu Masalah),* Surabaya, JP.Books, 2006.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* (PT Citra Aditya Bakti.
Bandung, 1997)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* (Sinar Grafika, Jakarta, 2011)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan,* (Yogyakarta: Kanisus,
2007)
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan
Pembentukannya,* (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Mardjono Reksodiputro, *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus
dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, Kertas Kerja pada*

- Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi, di FH UNAIR, (Bandung, Binacipta, 1982)*
- Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015)*
- Michael Clegg et.al. *the Hierarchy of Laws Understanding and Implementing the Legal Frameworks that Govern Elections, International Foundation for Electoral Systems, (Arlington, VA, International Foundation for Electoral Systems. 2011)*
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali), (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012)*
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)*
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana. cet.3. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)*
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991)*
- Muladi, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, (The Habibi Centre, Jakarta 2002)*
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)*
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2005)*

- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, (Pancuran Alam, Jakarta, 2008)
- O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. (Gunung Mulia, Jakarta, 1975)
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, “*Perihal Kaidah Hukum*” (Bandung: Alumni, 1989)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki dalam Dwi Putra Nugraha, et al. *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Cet. 1. (Thafa Media. Yogyakarta. 2017)
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017)
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Alumni, Bandung, 1985)
- _____, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999)
- Ridwan Syaidi Tarigan, *Kerah Putih Korporasi Pertanggungjawaban Tindak Pidana korupsi terhadap Korporasi*, (Banyumas, Amerta Media, 2021)
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1984)
- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989).
- Rosildi Ranggawidjaja, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, (Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996)
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Prenada Group, Jakarta, 2018)

- _____, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*,
(Jakarta: Kencana, 2016)
- Serlika Aprita (et.al), *“Hukum dan Hak Asasi Manusia”* (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2020)
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah
J.E Sahetapy, (Yogyakarta, Liberty, 1995)
- Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*,
(Surabaya, Airlangga University Press, 2003)
- Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Liberty, 1993)
- Erna Tri Rusmala, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum
Universitas Widya Mataram, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta,
Raja Grafindo Persada, 2006)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2007)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,
2007)
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta, UI Press, 2008)
- Sukarno Aburaera, *Filsafat Hukum Teori dan Praktis*, (Jakarta, Kencana, 2013)
- Sutan Remy. S. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*,
Edisi Kedua, (Kencana, Depok, 2017)
- _____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers,
2006)

Sutan Remy S. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet. 1. (Jakarta: Grafiti Per, 2007)

Syamsuddin Azis, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang; Ilmu Perundang-Undangan, Teori, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Edisi ke-3, 2021.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* Edisi Kedua, (Rajawali Pers, Jakarta, 2015)

_____, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013)

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2008)

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982)

Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi ketiga. cet.3. (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)

PerUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 135)

Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 32)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri (Berita Negara Republik Indonesia, No.1293, 2019)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 333)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 *jo.* No 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 190)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294)

Jurnal:

A'an Efendi, "Problematik Penataan Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan" Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol.5, Jember-Jawa Timur, 2019, DOI: 10.25123/vej.3172

- Andreas Tedy Mulyono, “Menyoal Konsep Polusi dan Depleksi dalam Hukum Lingkungan Indonesia:Perluakah? Bina Hukum Lingkungan”, 2023, hal. 158, DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i2.259>
- Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 2.
- Arnanda Yusliwidaka, “Menakar Efektivitas Konsep Omnibus Law Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Masa Pandemi Covid-19”, e-journal, Universitas Diponegoro, 2020, Jurnal Hukum Progresif: Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
- Bagir Manan. “Penelitian di bidang Hukum”. dalam Jurnal Hukum, Nomor Perdana, volume 1. Bandung: Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 1999.
- Bivitri Susanti, ”Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Jentera Volume 1 No. 2 (2017).
- Bilal Muhammad, et al., Jurnal Analisis Hukum “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam *Omnibus Law* Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha”, 2021, P-ISSN:;2620-4959, E-ISSN: 2620-3715.
- Byung-Sun Cho, “*Emergence of an International Environmental Criminal Law?*”, UCLA Journal of Environmental Law and Porosillicy, 19, 2000/2001, DOI: 10.5070/L5191019216
- Diah Ayu Rachma, Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, jurnal.komisiyudisial, E-ISSN: 2579-

4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 16 No. 1 April 2023, DOI:
10.29123/jy/v16i1.574

Enda Kartika Sari, et.al. “Potensi dan Karakteristik Limbah Padat *Fly Ash* dan *Bottom Ash* Hasil Pembakaran Batubara PT Bakti Nugraha Yuda Energy Terhadap Kuat Tekan *Paving Block*”, Jurnal Deformasi, Volume 8-1, Juni 2023, ISSN 2477-4960, EISSN 2621-7929

Grahat Negara, “Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)”, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 3, No. 2, 2017.

Geraldus Grenaldo Sentoso, Problematika Pemenuhan Kepatuhan Hukum Pengelolaan Limbah B3 Pada Industri Kabel Listrik (Studi Industri PT “X” Di Kota Bandung, 2023 : <https://doi.org/10.24970/bhl.v8i1.241>

Hadi Winarno, Pemanfaatan Limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* dari PLTU Sumsel-5 sebagai Bahan Utama Pembuatan *Paving Block*, Jurnal Teknik, No.1 tahun 2019, <https://doi.org/10.30736/jt.v11i1.288>

Hendra Wijaya, et.al., “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup” Notarius, Volume 14 Nomor 1 (2021 E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702

Ibnu Sina Chandranegara. “Bentuk Bentuk Perampingan dan Harmonisasi Regulasi”. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*. Vol 6. No. 3. 2019, DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art1

I Kadek Setiawan, “Inkonsistensi Pengaturan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro”, Jurnal Legasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, Denpasar, 2017, hal. 340.

Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma| Volume 10 No. 1, September 2019. ISSN 2656-4041.

Imamulhadi, Perkembangan *Strict Liability* dan *Precautionary* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”, (Bandung: Volume 25, Nomor, 3, Juni 2013, <https://doi.org/10.22146/jmh.16070>

Joni Sandri Ritonga, et.al., “Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup”, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, E-ISSN : 2809-9265 Volume 2, Nomor 4, December 2022

Kolte, “Fundamentals of Literature Review in Legal research. High Technology Letters”, Volume 27, Issue 9, 2022. <https://doi.org/10.37896/HTL27.9/4214>

Martti Koskenniemi, *Hierarchy in International Law: A Sketch*, EJIL, Vol. 8, 1998. DOI:[10.1093/oxfordjournals.ejil.a015607](https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a015607)

Michael Faure, “*Towards a New Model of Criminalization of Environmental Pollution. The Case of Indonesia*”, dalam Michael Faure & Nicole Niessen (Ed), *Environmental Law*, 2006, DOI: <https://doi.org/10.4337/9781847202918.00013>

- Michael Faure, “*The Revolution in Environmental Criminal Law in Europe*”,
Virginia Environmental Law Journal, 35, 2017, Vol. 35:321
- Michael G. Faure dan Marjolein Visser. “*Law and Economics of Environmental Crime: A Survey.*” *Pridobljeno*, Vol. 10, 2003.
- Mimansha Patel and Nitin Patel, “*Exploring Research Methodology*”, *International Journal of Research & Review*. Vol.6, Issue: 3, 2019, E-ISSN: 2349-9788; P-ISSN: 2454-2237
- Mahrus Ali, Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan Dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i1.131>
- Picinali, Federico (2016) *The denial of procedural safeguards in trials for regulatory offences: a justification. Criminal Law and Philosophy*. ISSN 1871-9791
- Purnama Wati, E, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 2018, DOI: 10.24970/jbhl.v3n1.9
- Ritonga, Joni Sandri et al, “Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup”, 2022, <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i4.32>

- Rizki Azizah Mahirah et al, “Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup” (DELH), 2023, DOI: 10.55123/insologi.v2i2.1733
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim”, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014: <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/848/835>
- Rodliyah, et.al., “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5 No. 1, Juni 2020 E-ISSN 2598-6414, P-ISSN 2502-5333
- Rusnan, Jurnal Diskresi “Reformulasi Model Pengaturan *Earmarking Tax* Pajak Rokok Yang Responsif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”, Universitas Mataram, Volume 1 No. 2, December 2022: <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/2054/732>
- Sarah Field, Lucy Jones, “*Death In The Workplace: Who Pays The Price?*”, *Company Lawyer*, Issue 6: 2011.
- Sebayang, Surya. 2010. “Pengaruh Kadar Abu Terbang sebagai pengganti sejumlah Semen pada Beton Alir Mutu Tinggi”. Bandar Lampung: Universitas Lampung, Jurnal Rekayasa, Vol.14 No.1, April 2010

- Slamet Kusnu Goesniadhie, “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan”, *Jurnal hukum*. No. 27 vol.11 September 2004:82–96,
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>
- Stanley L. Paulson, “*How Merkl’s Stufenbaulehre Informs Kelsen’s Concept of Law*”, *Revus*, 21, 2013), <https://doi.org/10.4000/revus.2727>
- Surya Hatina, “Pengaruh Komposisi *Bottom Ash*, Sabut Kelapa, Dan Batubara Sub-Bituminus Serta Pengaruh Waktu Pengeringan Dalam Kualitas Briket”, *Jurnal Univ.PGRI Palembang*, Volume 7, Nomor 2, Juli–Desember 2022
- Susan F. Mandiberg, S.F, 2009, “*Locating the Environmental Harm in Environmental Crimes*, *Utah Law Review*, 2009.,
<https://doi.org/10.4337/9781035309511.00010>
- Susan F. Mandiberg & Michael G. Faure, “*A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe*”, *Columbia Journal of Environmental Law*, University of Maastricht - Faculty of Law, Metro, 34, 2009.
<http://ssrn.com/abstract=1275547>
- Suseno, Hendro. “Pengaruh Penggunaan *Bottom Ash* Sebagai Pengganti Tanah Liat pada Campuran Bata Terhadap Kuat Tekan Bata”. Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 6, No.3, 2012.
<https://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/226>

Sutoyo, “Pengaturan Tangung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Hukum Lingkungan”, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Nomor 1, 2011, <https://doi.org/10.24815/sjil.v1i2.19276>

Teddy Prasetiawan, “Kontroversi Penghapusan Faba Dari Daftar Limbah B3”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021

Utari Ayuningtyas, et.al., “Pemanfaatan *Fly Ash* Dan *Bottom Ash* Sebagai Material Konstruksi Ramah Lingkungan Dalam Rangka Mendukung Kriteria Bangunan Hijau”, journal universitas Bangka Belitung, Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, 2022

Kamus:

Black’s Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America: West, 2004)

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Website:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c/> , diakses pada 02 Desember 2024

Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (deputi IV) “Lembar Operasional Teknis” pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Website ; b3.menlh.go.id, diakses pada 20 November 2024

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024

Hasil Penelitian:

AA.Oka Mahendra, “Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU dalam Rangka Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi”, makalah 'Workshop Pemahaman UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Yogyakarta, Oktober 2005.

Djarmiko, Tasha Amalia, “Studi Pengelolaan Limbah B3 Industri Pertambangan Batu Bara di PT Pampersada Nusantara Jobsite MTBU”. Jakarta: Universitas Pertamina, 2019

Inche Sayuna, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2016

Munir, Misbachul, “Pemanfaatan Abu Batubara (*fly Ash*) untuk *Hollow Block* yang Bermutu dan Aman bagi Lingkungan”. Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro. 2008

Priyatno D, “Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Bandung, Universitas Parahyangan, 2003.

Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)”, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011

Prasetiawan, Teddy, “Kontroversi Penghapusan FABA dari Daftar Limbah B3”, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021

Rudolf Silaban, “Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan“, Disertasi, (Semarang, Unissula, 2022),

Yurisprudensi:

Putusan Mahkamah Agung, No. 1515 K/Pid.Sus/2014

Lain-Lain:

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Nomor: B-60/E/Ejp/01/2002”, tanggal 29 Januari 2002, Butir 3.

Nandang Alamsah Deliarnoor, et.al, “Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus”, Modul Bahan Ajar pada Universitas Terbuka.

Dirdjosisworo, “Soejono, Anatomi Kejahatan Korporasi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi”, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 23 – 24 November 1989.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Ketentuan umum huruf D, “Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Limbah B3 SOP/UPM-SMKK/DJBM-155”, Tahun 2021

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Laporan Akhir; Kajian Tentang “Analisis Materi Muatan Produk Hukum Sektor Lahan dan Pertanahan” Semarang, 2023.

